



1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP  
ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT  
PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Syarat Guna*

*Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)*



**UIN SUSKA RIAU**

**OLEH**

**AUZANUL FIKRI**

**NIM.11527101302**

**JURUSAN ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM  
RIA  
1442 H / 2021 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **"PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA"** yang ditulis oleh:

Nama : AUZANUL FIKRI

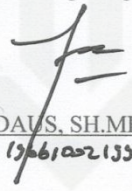
NIM : 11527101302

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juli 2021 H  
12 Juli 2021 M

Pembimbing Skripsi

  
FIRDAUS, SH.MH  
NIP. 19661021199031002

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA”, yang ditulis oleh:

Nama : AUZANUL FIKRI  
NIM : 11527101302  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 28 Juli 2021  
Waktu : 08.00 WIB  
Tempat : Daring / online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Alpi Syahrin, SH. MH**

Penguji I  
**Dr. Abu Samah, SH. MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH. MH**



Mengetahui :  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
**Dr. Zulkifli, M.Ag**  
NIM. 10941006 200501 1 005





## ABSTRAK

**AUZANUL FIKRI (2021):**

**Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Terhadap Alat Penerangan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.**

Penyediaan sarana penerangan jalan merupakan bentuk dari keberhasilan pembangunan Kota Pekanbaru. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan masih ada lampu-lampu jalan di Kota Pekanbaru tidak berfungsi atau tidak menyala. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Tidak berfungsinya lampu jalan dapat menimbulkan kerawanan bagi pengguna jalan, seperti kecelakaan, jambret, pencurian dan sebagainya. Di samping itu juga Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban dalam penyediaan alat-alat penerangan jalan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota, dan apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota, dilihat dari penempatan dan pemasangan sudah dilakukan sesuai

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagai tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dengan aturan yang berlaku, demikian juga halnya dengan pengoperasian sesuai dengan desain perencanaan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya bagian dari pengawasan adalah melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap alat penerangan jalan, serta penggantian dan penghapusan terhadap alat penerangan jalan sesuai dengan jangka waktu dan kondisi fisik. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan memang belum dapat dilakukan secara sempurna, masih terdapat kekurangan pada bagian-bagian tertentu yang harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota, antara lain adalah wilayah yang cukup luas yang sulit untuk menjangkau secara cepat, karena personil yang ada juga dirasa masih kurang untuk memantau seluruh tempat-tempat alat penerangan jalan tersebut. Di samping itu juga kekurangan peralatan yang dipergunakan untuk mengganti atau memperbaiki alat penerangan jalan yang rusak, serta kesulitan untuk melakukan pemeliharaan terhadap kerusakan karena kekurangan peralatan yang tersedia tersebut, sehingga belum maksimal dalam melakukan perbaikan dan penggantian terhadap alat penerangan jalan.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada Penulis. Shalawat dan salam buat teladan ummat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang diridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara Moril maupun Materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Almarhum Ayahanda tercinta Ishak, SH dan Ibunda tercinta Zuliani yang senantiasa memberikan rasa sayang, didikan serta do'a yang selalu dipanjatkan pada Allah kepada penulis, dan kepada adik-adik yang telah memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih untuk semuanya.
2. Bapak Rektor UIN Suska Riau, Prof. Dr. Hairunas, M,Ag beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

- Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga Skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Terima kasih.

Pekanbaru, Juli 2021

**NIM.11527101302**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru .....	14
B. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru .....	17
C. Kecamatan Pekanbaru Kota .....	20
<b>BAB III : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pemerintah Daerah .....	25
B. Pengawasan .....	28
C. Alat Penerangan Jalan .....	32
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Terhadap Alat Penerangan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhu-	



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota .....	35
B. Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Terhadap Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota .....	45

## **BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum, begitu berbunyi dari Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pemerintahan dan Negara harus berdasarkan kepada aturan hukum dan perundang-undangan.

Pemerintahan adalah segala urusan dilakukan oleh Negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya dan kepentingan Negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai Pemerintahan yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif. Oleh karena itu membicarakan sistem pemerintahan adalah membicarakan bagaimana pembagian kekuasaan hubungan antar lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara itu, dalam rangka menyelenggarakan kepentingan rakyatnya.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. V, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, 1983), h.171.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 © Himpunan Mahasiswa Islam UIN Suska Riau  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian kekuasaan yang berlaku di Indonesia dalam hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah merupakan konteks pengertian yang bersifat vertikal sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya hubungan kewenangan antara Pusat dan Daerah diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman Daerah (Pasal 18 A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Juga hubungan antara Pemerintah Daerah Otonom dengan Pemerintah Nasional/Pusat adalah bersifat tergantung dan hirarki.<sup>2</sup>

Amanah konstitusi untuk diselenggarakannya otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijabarkan lebih lanjut di dalam Pasal 2 yang menyatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah Provinsi, dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Pasal 3 menegaskan bahwa Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan Daerah dan masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Abu Samah dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2016), h. 8.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Bab I Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah merupakan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah berwenang mengelola Sumber Daya Nasional dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan<sup>3</sup>.

Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan urusan Pemerintahan yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (3) menyatakan bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>3</sup>Pasal 5 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 9 ayat (4) menyatakan Urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah<sup>4</sup>.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Di samping itu penyelenggaraan otonomi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pokok yaitu :

- a. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- b. Peran serta dan prakarsa masyarakat
- c. Pemertaan dan memperhatikan potensi
- d. Keanekaragaman daerah dalam tatanan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>5</sup>

Konsekuensi dari penyelenggaraan otonomi daerah di dalam masyarakat demokratis dewasa ini, yakni ditandai dengan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan daerah sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah tersebut dilakukan dalam rangka mempererat kembali keutuhan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan

<sup>4</sup>Otonomi Daerah Adalah Hak, Wewenang, dan Kewajiban Daerah Otonom Untuk Mengatur dan Mengurs Sendiri Urusan Pemerintahan dan Kepentingan Masyarakat Setempat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 6.

<sup>5</sup>Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: Kata Hasta, 2005) h. 146



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia, sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat terhadap bentuk Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan.<sup>6</sup>

Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai daerah otonom senantiasa melakukan pembenahan dan pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan perkembangan yang terjadi di wilayah Kota Pekanbaru, termasuk mengenai penyediaan fasilitas untuk masyarakat dalam menggunakan jalan raya. Untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam menggunakan jalan raya, maka perlu penyiapan dan penertiban terhadap penerangan jalan, agar memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama yang menggunakan jalan pada waktu malam hari.

Penerangan jalan memang sangat penting diperhatikan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru, karena pajak penerangan jalan tersebut juga sudah dibebankan kepada masyarakat pada waktu pembayaran rekening listrik atau pada waktu pembelian token. Oleh karena itu sudah sewajarnya Pemerintah Kota Pekanbaru memperhatikan fasilitas penerangan jalan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan disebutkan bahwa, Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang

<sup>6</sup>Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012), h.176



Hal Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lalu lintas. Selanjutnya pada Pasal 3 dijelaskan bahwa, Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenisnya, terdiri atas:

- a. Alat Penerangan Jalan berdasarkan jenis lampu.
- b. Alat Penerangan Jalan berdasarkan catu daya, dan
- c. Alat Penerangan Jalan berdasarkan kuat pencahayaan.

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa, alat penerangan jalan berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas yang dilewati oleh pengguna jalan. Fasilitas penerangan jalan ini memang sangat penting, agar pengguna jalan merasa nyaman dan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Pasal 87 ayat (2) disebutkan bahwa, Penyelenggaraan Alat Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Menteri untuk jalan nasional.
- b. Gubernur untuk jalan provinsi.
- c. Bupati untuk jalan kabupaten dan jalan desa.
- d. Walikota untuk jalan kota.

Dari ketentuan tersebut, maka dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan alat penerangan jalan kota dilakukan oleh Walikota atau instansi yang terkait, yakni Dinas Perhubungan. Untuk pengadaan dan pembuatan alat penerangan jalan dilakukan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan dan terdaftar pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyediaan sarana penerangan jalan merupakan bentuk dari keberhasilan pembangunan Kota Pekanbaru. Namun kenyataan yang ditemui di lapangan masih ada lampu-lampu jalan di Kota Pekanbaru tidak berfungsi atau tidak menyala. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Tidak berfungsinya lampu jalan dapat menimbulkan kerawanan bagi pengguna jalan, seperti kecelakaan, jambret, pencurian dan sebagainya. Di samping itu juga Pemerintah Kota Pekanbaru mempunyai kewajiban dalam penyediaan alat-alat penerangan jalan sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

Di samping itu juga masih ada jalan-jalan yang ada di Kota Pekanbaru, khususnya dalam wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota yang belum ada alat penerangan jalannya, yang seharusnya sudah tersedia karena merupakan wilayah yang cukup ramai dan rawan terhadap kecelakaan dan kejahatan. Oleh karena itu instansi terkait harus melakukan pengawasan terhadap peralatan penerangan jalan, dan penyediaan terhadap alat penerangan jalan tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dengan mengambil judul penelitian: “Pelaksanaan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan oleh Dinas Perhubungan Terhadap Alat Penerangan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota”.

## **B. Batasan Masalah**

Kajian ini merupakan kajian terhadap pembuatan, penyediaan, dan perawatan terhadap peralatan penerangan jalan, serta pengawasan terhadap peralatan penerangan jalan di lingkungan daerah Kecamatan Pekanbaru Kota. Kajian ini didasarkan kepada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota?
2. Apa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota?

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**



Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.
2. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan penulis di bidang Ilmu Hukum Tata Negara, terutama menyangkut masalah pengawasan terhadap alat penerangan jalan.
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang melakukan kajian mengenai pengawasan terhadap alat penerangan jalan pada masa yang akan datang.

## **E. Metode Penelitian**

Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>7</sup> Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan

<sup>7</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h.52



terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif,<sup>8</sup> artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

## 2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan penulis melakukan penelitian ini pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis mengambil lokasi penelitian ini adalah, bahwa Dinas Perhubungan merupakan instansi yang diberi tanggung jawab oleh Walikota untuk melakukan pengawasan dan penyediaan alat penerangan jalan di Kota Pekanbaru, sehingga perlu dilihat bagaimana pelaksanaan pengawasan dan penyediaan alat penerangan jalan, serta faktor yang mempengaruhi dalam melakukan pengawasan terhadap alat penerangan jalan tersebut.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Pengawasan Alat Penerangan Jalan, Seksi Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, dan perwakilan pengguna jalan. Sedangkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pengawasan terhadap alat penerangan jalan dalam wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h.50



#### 4. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Hukum Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian,<sup>9</sup> dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak yang berhubungan dengan pelaksanaan pengawasan terhadap alat penerangan jalan dalam wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota.
- b. Data Hukum Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,<sup>10</sup> yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Data hukum tertier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.<sup>11</sup> Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang ada.<sup>12</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Sub Bagian Pengawasan Alat Penerangan Jalan

<sup>9</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h.30

<sup>10</sup> *Ibid*, h.30

<sup>11</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.118

<sup>12</sup> *Ibid*, h.119





2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Komersil pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru 1 orang, Seksi Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebanyak 1 orang, dan perwakilan pengguna jalan sebanyak 10 orang. Oleh karena populasi jumlahnya tidak terlalu besar, maka penulis mengambil seluruh populasi menjadi sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

**Tabel I.1**  
**Populasi dan Sampel**

NO	JENIS POPULASI	POPULASI	SAMPEL	PERSENTAS	KETERANGAN
		I		E	N
1	Kepala Sub Bagian Pengawasan	1	1	100%	Total Sampling
2	Seksi Penerangan Jalan	1	1	100%	Total Sampling
3	Perwakilan pengguna jalan	10	10	100%	Total Sampling
	<b>JUMLAH</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>100%</b>	<b>Total Sampling</b>

Sumber: Data lapangan, 2021

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan langsung di lapangan, untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap subjek maupun objek penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung untuk mencapai tujuan tertentu kepada subjek penelitian, yaitu Kepala Sub Bagian Pengawasan Alat Penerangan Jalan pada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, staf pada Bagian Pengawasan, serta perwakilan dari pengguna jalan..

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>14</sup>

## 7. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan metode analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara lisan melalui wawancara dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, yakni mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap alat penerangan jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta kendala yang dialami oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap alat penerangan jalan di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota, kemudian diambil kesimpulan dengan

<sup>13</sup>Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h.106

<sup>14</sup>Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011),



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode deduktif, yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.<sup>15</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, maka penulis menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Pada bab ini menguraikan gambaran umum tentang Kota Pekanbaru, gambaran umum Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, serta gambaran umum Kecamatan Pekanbaru Kota.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas dan menggambarkan mengenai pengertian Pemerintah Daerah, pengertian pengawasan, dan pengertian alat penerangan jalan.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), h.252



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap alat penerangan jalan oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota, serta kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.

UIN SUSKA RIAU





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama "Senapelan" yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak. Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajah 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi "**Pekan Baharu**" selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota



Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan "Pekan Baharu", yang dalam bahasa sehari-hari disebut

### PEKANBARU.

Penduduk Kota Pekanbaru bersifat heterogen dengan latar belakang etnis, adat istiadat, agama, pendidikan, pekerjaan serta sosial budaya yang berbeda. Dari segi etnis, Kota Pekanbaru terdiri dari penduduk multi etnis. Kota ini dihuni oleh etnis Melayu, Minang, Batak, Jawa, Banjar, Bugis dan Cina serta kelompok etnis lainnya yang jumlahnya tidak terlalu besar. Namun demikian etnis Melayu merupakan jumlah terbesar dan secara kebudayaan dominan. Hal ini karena kelompok etnis Melayu merupakan etnis asli daerah Riau, sedangkan kelompok etnis lainnya merupakan imigran yang datang dari berbagai daerah di Indonesia.<sup>16</sup>

Heterogenitas penduduk cukup mewarnai kehidupan sosial penduduk Kota Pekanbaru. Interaksi antar kelompok etnis yang berbeda pada hakekatnya relatif punya jarak sosial tertentu. Namun demikian, struktur sosialnya didukung oleh norma-norma agama dan adat. Meski kedua norma tersebut mempunyai kekuatan yang berbeda dalam mengikat anggota masyarakatnya, norma agama, terutama norma agama Islam yang banyak dianut oleh anggota masyarakat cukup dapat mempertautkan jarak sosial karena perbedaan etnis tersebut.

Stratifikasi masyarakat Kota Pekanbaru pada dasarnya bersifat terbuka, dimana semua mempunyai kesempatan yang sama untuk menduduki suatu

<sup>16</sup>Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka*, 2012, h.63



posisi atau struktur sosial yang lebih tinggi. Biasanya Stratifikasi ditentukan oleh sesuatu yang dihargai. Keadaan seperti ini dapat dimengerti karena heterogenitas penduduknya baik dari aspek latar belakang pendidikan, etnis, pekerjaan, usaha dan jasa yang dilakukannya.

Dalam masyarakat Kota Pekanbaru sekurang-kurangnya ada tiga bentuk lapisan yang muncul kepermukaan yaitu berdasarkan tingkat ekonomi, pendidikan dan jabatan yang diduduki seseorang. Dari ketiga lapisan itu, terlihat aspek ekonomi mendapat tempat yang ketika melihat Kota Pekanbaru sebagai Kota Minyak dan perdagangan yang sedang mengeliat untuk memacu segala ketinggian dalam bidang dunia Industrialisasi.

Pekanbaru yang sedang bekerja keras untuk menjadi Kota Industri, perdagangan dan jasa. Tidak heran kalau ditemukan berbagai bangunan baru yang diperuntukan sebagai perkantoran, usaha retail lebih menonjol dibandingkan dengan dua aspek lainnya. Penilaian masyarakat yang demikian dapat dipahami dan hotel-hotel yang indah bak pencakar langit. Di samping itu berdiri pula, mall, fese food, Cafe sebagai tempat masyarakat berbelanja yang sudah bertebaran di beberapa kawasan di Kota Pekanbaru. Namun demikian hal-hal di atas akan melahirkan berbagai masalah sosial yang akan menimbulkan kerawanan di dalam masyarakat yang baru saja mengalami krisis moneter. Semua itu membawa pengaruh di dalam kehidupan sosial.<sup>17</sup>

Pada era reformasi membawa angin segar bagi masyarakat Riau pada umumnya dan Kota Pekanbaru khususnya. Era dimana masyarakat Riau mulai

<sup>17</sup> Ibid.



bisa bersuara atau menyuarakan keinginan dan aspirasinya. Melalui kelompok-kelompok reformasi serta kalangan intelektual Riau, masyarakat Riau mulai menuntut pembagian hasil kekayaan alamnya atau pertimbangan keuangan antara pusat dan daerah, 10 % hasil minyak Riau untuk dapat dimanfaatkan guna pembangunan Riau. Sejak otonomi daerah dilancarkan dan adanya pertimbangan keuangan tersebut, denyut pembangunan mulai dapat dirasakan, termasuk pembangunan Kota Pekanbaru sebagai pusat Pemerintahan Provinsi Riau.

Masyarakat Riau pada umumnya dan Pekanbaru khususnya bisa berbangga diri ketika pemerintah pusat memberikan otonomi kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang di jabarkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah mendatangkan berkah yang luar biasa bagi bumi lancang kuning, khususnya bagi pemerintah Kabupaten Kota yang ada di provinsi Riau.

## **B. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru**

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada pada lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, yang membantu tugas-tugas Walikota dalam bidang perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok untuk





menjabarkan program kerja dalam rangka meningkatkan kinerja perhubungan pada lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diharapkan mempunyai kompetensi yang bisa diandalkan untuk mampu menjadi motor penggerak perangkat daerah dalam memperlancar roda transportasi di Kota Pekanbaru.

Untuk lebih mengoptimalkan keikutsertaan dinas-dinas teknis dalam mengaplikasikan program-program yang menjadi prioritas kota, maka Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan amanat kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan dan mengatur sistem transportasi di Kota Pekanbaru.

Sebagai perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Membina yang merupakan segala usaha dan kegiatan pelatihan serta bimbingan ke arah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas.
- c. Merumuskan kebijakan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis sistem transportasi, pengawasan/pemantauan, pengembangan, dan pengkajian serta pengendalian roda transportasi.



- d. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengaturan sistem transportasi dan perangkatnya.
- e. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi mengenai sistem transportasi yang dikembangkan.
- f. Merumuskan dan melaksanakan, pengembangan, pengawasan dan penertiban jalur transportasi.
- g. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan penertiban jalur lalu lintas dan angkutan jalan.
- h. Merumuskan dan melaksanakan peñatausahaan atas jalur-jalur transportasi yang dikembangkan.<sup>18</sup>

Sebagai pemberian pelayanan umum di bidang perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru berperan dalam:

- a. Mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan kebijakan teknis penertiban moda transportasi sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan.
- b. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana transportasi.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan serta penertiban moda transportasi.
- d. Merumuskan dan melaksanakan pemetaan jalur moda transportasi.
- e. Merumuskan dan melaksanakan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan.

Selanjutnya sebagai pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas, maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, berperan dalam:

<sup>18</sup> Ekspos Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2020.



- a. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan.
- b. Membina pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
- c. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, dan keuangan, serta administrasi kepegawaian.
- d. Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, protocol, kearsipan, keuangan dan kepegawaian.<sup>19</sup>

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru didukung oleh unsur organisasi dengan struktur sebagai berikut:

Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.

Sub Dinas Program, mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kebijakan rencana, pengaturan jalur moda transportasi.

Sub Dinas Pendataan dan Pembinaan, mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis kegiatan sistem transportasi.

### C. Kecamatan Pekanbaru Kota

Pemerintah Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan bagian dari wilayah Pemerintah Kota Pekanbaru, tentunya harus mendukung visi dan misi dari

<sup>19</sup> Ibid.



pemerintah Kota Pekanbaru. Visi Pemerintah Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”.

Smart City adalah Kota yang mampu melayani, melindungi, dan memenuhi semua kebutuhan warganya dengan baik secara berkelanjutan dengan dukungan teknologi dan infrastruktur serta berorientasi mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan untuk warganya.

Madani adalah Kota yang memiliki akhlak mulia, peradaban maju, modern, memiliki kesadaran sosial yang kuat, gotong royong, toleran, dalam sistem politik yang demokratis dan ditopang oleh supremasi hukum yang berkeadilan, berpendidikan maju, berbudaya melayu, aman, nyaman, damai, sejahtera, bertanggungjawab serta berlandaskan iman dan taqwa.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah daerah Kota Pekanbaru tahun 2017 – 2022, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Bertaqwa, Mandiri, Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi.
2. Mewujudkan Pembangunan Masyarakat Madani Dalam Lingkup Masyarakat Berbudaya Melayu.
3. Mewujudkan Tata Kelola Kota Cerdas dan Penyediaan Infrastruktur yang Baik.

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau





4. Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Ekonomi Padat Modal, pada Tiga Sektor Unggulan yaitu Jasa, Perdagangan dan Industri (olahan dan MICE).

5. Mewujudkan Lingkungan Perkotaan yang Layak Huni (Liveable City) dan Ramah Lingkungan (Green City).<sup>20</sup>

Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yakni Kelurahan Simpang Empat, Kelurahan Sumahilang, Kelurahan Tanah Datar, Kelurahan Kota Baru, Kelurahan Sukaramai, dan Kelurahan Kota Tinggi. Dengan luas wilayah 2,26 Km<sup>2</sup>, dan jumlah penduduk sebanyak 26.438 Jiwa.

Jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota yakni penduduk laki-laki sebanyak 13.189 (tiga belas ribu seratus delapan puluh sembilan) orang, dan perempuan sebanyak 13.247 (tiga belas ribu dua ratus empat puluh tujuh) orang.

Jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota menurut kepadatan penduduk, yakni sebanyak 11.697 (sebelas ribu enam ratus sembilan puluh tujuh) jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk ini terus meningkat sejalan dengan perkembangan kota, dan banyaknya pendatang, seperti pedagang, pekerja dan sebagainya.

Jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota menurut kelompok umur yakni, 0-4 tahun sebanyak 1.838 (seribu delapan ratus tiga puluh delapan) orang, 5-9 tahun sebanyak 2.335 (dua ribu tiga ratus tiga puluh lima) orang, 10-

<sup>20</sup>Data Statistik Kota Pekanbaru, 2020



14 tahun sebanyak 2.173 (dua ribu seratus tujuh puluh tiga) orang, dan 15-19 tahun sebanyak 1.700 (seribu tujuh ratus) orang.

Jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota menurut rumah tangga yakni sebanyak 7.682 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) rumah tangga. Jumlah rumah tangga ini bukan jumlah yang statis tetapi terus berkembang, dan jumlahnya terus meningkat setiap tahun.

Jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota yang belum kawin sebanyak 13.229 (tiga belas ribu dua ratus dua puluh sembilan) orang, yang sudah kawin sebanyak 11.940 (sebelas ribu sembilan ratus empat puluh) orang, yang bercerai hidup sebanyak 341 (tiga ratus empat puluh satu) orang, dan yang bercerai mati sebanyak 926 (sembilan ratus dua puluh enam) orang.

Jumlah penduduk Kecamatan Pekanbaru Kota yang memiliki E-KTP sebanyak 18.580 (delapan belas ribu lima ratus delapan puluh) orang, yang memiliki akta kelahiran sebanyak 9.714 (sembilan ribu tujuh ratus empat belas) orang, yang belum memiliki akta kelahiran sebanyak 16.722 (enam belas ribu tujuh ratus dua puluh dua) orang, dan yang memiliki kartu keluarga sebanyak 7.682 (tujuh ribu enam ratus delapan puluh dua) orang.

Jumlah penduduk yang pindah dan datang di Kecamatan Pekanbaru Kota, yakni yang pindah laki-laki sebanyak 91 (sembilan puluh satu) orang, dan perempuan sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang, dan yang datang ke Kecamatan Pekanbaru Kota, yakni laki-laki sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang, dan perempuan sebanyak 78 (tujuh puluh delapan) orang.



Luas kawasan hutan dan perairan di Kecamatan Pekanbaru Kota, yakni hanya penggunaan lahan untuk yang lainnya yakni seluas 228 Ha. Di Kecamatan Pekanbaru Kota tidak ada kawasan hutan dan perairan. Wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota merupakan kawasan kota yang terdiri dari tempat-tempat usaha dan perdagangan/bisnis.

Jumlah fasilitas kesehatan di Kecamatan Pekanbaru Kota, yakni rumah sakit berjumlah 3 (tiga) buah, rumah sakit bersalin 1 (satu) buah, dan poliklinik 4 (empat) buah. Sejalan dengan perkembangan kota dan jumlah penduduk, maka jumlah fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Pekanbaru Kota juga terus meningkat.

Jumlah penduduk perempuan pada lembaga pemerintahan di Kecamatan Kota Pekanbaru Kota sebanyak 30 (tiga puluh) orang, dan perempuan sebagai kepala keluarga sebanyak 1.329 (seribu tiga ratus dua puluh sembilan) orang. Jumlah perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah tersebut juga terus meningkat, karena adanya penambahan pegawai dan pindahan dari tempat lain ke Kota Pekanbaru.

Kondisi tempat ibadah di Kecamatan Pekanbaru Kota terdiri dari 26 (dua puluh enam) buah mesjid, 17 (tujuh belas) buah mushola, gereja protestan 13 (tiga belas) buah, dan gereja katolik 1 (satu) buah.<sup>21</sup> Kondisi tempat ibadah tersebut juga ada penambahan sejalan dengan banyaknya pendatang dan pertambahan jumlah penduduk di wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

## BAB III

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pemerintah Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.<sup>22</sup>

Dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dikatakan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.





Menurut Sarundajang<sup>23</sup> “Pemerintahan daerah merupakan konsekuensi logis dari adanya perbedaan etnis, linguistik, agama dan institusi sosial berbagai kelompok masyarakat lokal di suatu Negara”.

Fungsi Pelayanan dan pengaturan umum dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan perlu di distribusikan secara sentral dan lokal agar ia benar-benar aspiratif, baik terhadap kepentingan nasional maupun terhadap tuntutan heterogenitas lokal dimaksud. Disamping itu adanya pemerintahan daerah akan memperbesar akses setiap warga Negara untuk berhubungan langsung dengan pemimpinnya dan sebaliknya pimpinan daerah akan memperoleh kesempatan luas untuk mengetahui potensi sumber daya, masalah, kendala, dan kebutuhan daerahnya dan menghilangkan mekanisme pembuatan keputusan yang kurang efisien. Demikian juga bagi suatu daerah dengan populasi yang relatif homogen akan lebih berpeluang menghasilkan keputusan-keputusan yang tidak antagonistik dengan kondisi dan kebutuhan anggota masyarakat yang dominan diwilayah tertentu.<sup>24</sup>

Berbicara mengenai otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari percakapan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan, antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam konteks bentuk Negara Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara kesatuan berbentuk Republik”

<sup>23</sup> Krishna D. Darumurti dan Uumbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksanaan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000) h 2-3.

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 3



Ketentuan konstitusional itu memberikan pesan bahwa Negara repuderasiblik Indonesia yang di proklamasikan pada tanggal 17 agustus 1945 dibangun dalam sebuah kerangka Negara yang berbentuk kesatuan (*unitary*), dan bukan berbentuk federasi (*serikat*). Dengan demikian, adanya daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah). Haruslah diletakkan dalam bingkai pemahaman Negara berbentuk kesatuan bukan berbentuk federasi, sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945 tersebut diatas. Demikian pula, hal tersebut dipertegas dalam penjelasan Pasal 18 undang-undang dasar 1945 dengan mengatakan, bahwa: “Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *staat* juga”

Dalam konteks itulah, dapat dipahami bahwa konsekuensi atas pemahaman Pasal 1 ayat (1) undang-undang dasar 1945, maka dalam Pasal 18 undang-undang dasar 1945 dirumuskan judul babnya “pemerintah daerah” dengan isi pasalnya, sebagai berikut: “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam system pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Pada bagaian lain dalam penjelasan pasal 18 undang-undang dasar 1945 tersebut dikatakan: “Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil”.



Tampaknya apa yang dimaksudkan sebagai daerah besar dalam penjelasan itu, disebut sebagai propinsi. Propinsi terdiri dari daerah-daerah yang lebih kecil, sebagaimana dikenal dengan nama kabupaten, kotamadya/kota, kecamatan, kelurahan/desa. Dari sinilah, dikemudian hari sejarah otonomi daerah di Indonesia mengenal otonomi bertingkat (hierarki), sebagaimana tercermin dalam sebutan daerah tingkat I, II, dan III.

Berkenaan dengan soal otonomi bertingkat ini, sebenarnya bung hatta pada tahun 1956 telah mengemukakan pendapatnya (kelak dikenal sebagai konsepsi hatta) dalam pidatonya penerimaan gelar doktor kehormatan dari Universitas Gajah Mada. Dalam konsepsinya itu, hatta mengatakan bahwa untuk mendekatkan demokrasi yang bertanggung jawab kepada rakyat, maka yang terbaik adalah titik berat pemerintahan sendiri (otonomi) diletakan pada kabupaten.

Pendapat hatta di atas dapat dilogikakan bahwa apabila otonomi tidak diletakan pada kabupaten/ kota/ kotamadya atau daerah tingkat II ( misalnya, bila otonomi diletakan pada propinsi/ daerah tingkat I), maka demokrasi menjadi jauh dari rakyat. Hal lain dari konsepsi hatta adalahn bahwa dengan menitikberatkan otonomi pada daerah tingkat (dati) II, maka daerah tingkat II dapat membina perkembangan desa-desa untuk mencapai tingkat kemampuan “mengurus rumah tangganya sendiri”

Sejalan dengan pendapat diatas, melihat kelemahan pelaksanaan otonomi bertingkat, soetadjo kartohadikusumo dalam tulisanya yang berjudul



*konsepsi hatta*, berpendapat bahwa propinsi merupakan buatan pemerintah belanda dan untuk itu perlu dihapuskan saja (pamudji, XIX (3) : 215). Oleh karena itu, sotardjo menyokong sepenuhnya *konsepsi hatta*, bahwa otonomi perlu diletakan di daerah tingkat II. Disamping itu, pelaksanaan otonomi yang bertingkat-tingkat mempersulit jalanya pemerintahan, yaitu memerlukan peraturan yang berliku-liku, dan dengan sendirinya tidaklah efisien.<sup>25</sup>

Sebagaimana diketahui, masalah dimana letak otonomi daerah menyangkut pula persoalan pilihan asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang bersekala kota/kabupaten meliputi:

- a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;

<sup>25</sup> Ibid, h. 5-7





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
- c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Pemyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. Penanganan bidang kesehatan;
- f. Penyelenggaraan pendidikan;
- g. Penanggulangan masalah sosial;
- h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. Pengendalian lingkungan hidup;
- k. Pelayanan pertahanan;
- l. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. Pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>26</sup>

Di dalam UU Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dan diubah lagi dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia

<sup>26</sup> Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah





sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945.<sup>27</sup>

Untuk mewujudkan Keberhasilan otonomi daerah sangat tergantung kepada pemerintah daerah, yaitu DPRD dan kepala daerah dan perangkat daerah serta masyarakatnya untuk bekerja keras, terampil, disiplin, dan berperilaku dan atau sesuai dengan nilai, norma, serta ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dengan memperhatikan prasarana dan sarana serta dana/pembiayaan yang terbatas secara efisien, efektif, dan professional.<sup>28</sup>

Untuk mewujudkan *good government* dan *clean government* tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikenal istilah undang-undang otonomi daerah, dimana dengan adanya undang-undang ini diharapkan pemerintah tidak sentralistik di Jakarta tetapi juga adanya pelimpahan kewenangan dari pusat kedaerah yang kita sebut desentralisasi.<sup>29</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 mengartikan pemerintah daerah sebagai kepala daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah. Daerah otonom menurut undang-undang ini adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa

<sup>27</sup> Ibid.

<sup>28</sup> HAW. Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001) h. 23.

<sup>29</sup> Dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 disebut desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara kesatuan republik Indonesia.



sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara Republik Indonesia.<sup>30</sup>

## B. Pengawasan

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.<sup>31</sup>

Robert J. Mockler menyatakan, bahwa pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka tujuan dari pengawasan adalah untuk mengetahui dan memahami kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang menjadi objek pengawasan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak, sebagai bahan untuk melakukan perbaikan-perbaikan di waktu yang akan datang.<sup>32</sup>

Adapun tipe-tipe dasar dari pengawasan tersebut adalah sebagai berikut:

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> T. Hani Handoko, *Manajemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999), h.359

<sup>32</sup> Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), h.96



UIN SUSKA RIAU  
 © Alakipta milk UIN Suska Riau  
 Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengawasan pendahuluan, pengawasan ini dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.

Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui terlebih dahulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

Pengawasan umpan balik, pengawasan ini dilakukan untuk mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa di masa yang akan datang.

Sedangkan tahapan-tahapan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan).
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
4. Perbandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan.
5. Pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> T. Hani Handoko, *Op, Cit*, h.362



Fungsi pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting yaitu untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program pembangunan nasional, sehingga diharapkan dengan pelaksanaan pengawasan yang efektif akan terwujud tujuan yang dikehendaki. Peranan pengawasan di dalam pelaksanaan pembangunan adalah untuk mendeteksi secara dini terhadap berbagai penyimpangan yang mungkin terjadi. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya fungsi pengawasan demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih.<sup>34</sup>

UNDP sebagaimana yang dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara mengajukan karakteristik *good governance*, sebagai berikut :<sup>35</sup>

1. *Participation*, Setiap Warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.
2. *Rule of Law*, Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. *Transparency*, Transparansi dibangun atas kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.

<sup>34</sup> Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, (Yogyakarta: Univesitas Atma Jaya, 2005), h.21

<sup>35</sup> Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001), h.25-26.





4. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap *stakeholder*.
5. *Consensus orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*, Semua Warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stake holders*.
9. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dalam pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Sehubungan dengan menciptakan pemerintahan yang bersih, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.





### C. Alat Penerangan Jalan

Penerangan merupakan proses, cara, perbuatan menerangkan (memberikan penjelasan). Di samping itu penerangan juga dapat diartikan sebagai alat-alat untuk menerangi (seperti lampu dan sebagainya).

Alat penerangan jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.<sup>36</sup> Sedangkan jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Adapun lingkup pengaturan tentang alat penerangan jalan adalah sebagai berikut:

1. Jenis alat penerangan jalan.
2. Spesifikasi teknis alat penerangan jalan.
3. Penyelenggaraan alat penerangan jalan, dan
4. Pembuatan alat penerangan jalan.

Beberapa lingkup alat penerangan jalan tersebut merupakan ketentuan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh instansi terkait, terutama yang berhubungan dengan kenyamanan pengguna jalan. Di samping itu juga untuk lebih memperindah penampilan kota, dengan adanya penataan lembaga atau tempat pendidikan, yang dilakukan secara umum.

<sup>36</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan.



Di perkotaan maupun di pendesaan sudah banyak ruas jalan umum yang dilengkapi dengan fasilitas penerangan pada malam hari atau juga disebut penerangan jalan umum. Penerangan yang prima tersebut mutlak diperlukan karena merupakan salah satu kebutuhan masyarakat ketika melalui jalanan.

Penerangan jalan umum adalah infrastruktur lampu yang merupakan pelengkap jalan sehingga dapat digunakan untuk menerangi jalan di malam hari. Fungsi dari penerangan jalan umum adalah:

1. Keamanan, yaitu yang berkaitan dengan kuatnya penerangan dan distribusi cahaya yang sesuai dengan bidang jalan dan kecepatan kendaraan yang melaluinya.
2. Ekonomi, yaitu yang berkaitan dengan kelancaran distribusi barang. Jika lampu jalan terang, maka arus transportasi bisa lancar dan pengangkutan barang dapat dilakukan lebih cepat.

Di samping itu juga ada fungsi lain dari penerangan jalan, yaitu:

1. Menghasilkan kontras antara obyek dan permukaan jalan.
2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan.
3. Memberikan rasa aman dan meningkatkan keselamatan para pengguna jalan.
4. Mendukung keamanan suatu daerah.
5. Menambah nilai estetika atau keindahan lingkungan jalan.

Dari pernyataan tersebut, maka penerangan jalan adalah sarana dan prasarana jalan yang sangat dibutuhkan oleh pengendara terutama pada waktu malam hari. Oleh karena itu pemerintah dan pemerintah daerah melalui instansi terkait harus senantiasa memperhatikan fasilitas penerangan jalan tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota, dilihat dari penempatan dan pemasangan sudah dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, demikian juga halnya dengan pengoperasian sesuai dengan desain perencanaan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya bagian dari pengawasan adalah melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap alat penerangan jalan, serta penggantian dan penghapusan terhadap alat penerangan jalan sesuai dengan jangka waktu dan kondisi fisik. Namun pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan memang belum dapat dilakukan secara sempurna, masih terdapat kekurangan pada bagian-bagian tertentu yang harus diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap alat penerangan jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota, antara lain adalah wilayah yang cukup luas yang sulit untuk menjangkau secara cepat, karena personil yang ada juga dirasa masih kurang untuk memantau seluruh tempat-tempat alat penerangan jalan tersebut. Di samping itu juga kekurangan peralatan yang dipergunakan untuk mengganti atau



memperbaiki alat penerangan jalan yang rusak, serta kesulitan untuk melakukan pemeliharaan terhadap kerusakan karena kekurangan peralatan yang tersedia tersebut, sehingga belum maksimal dalam melakukan perbaikan dan penggantian terhadap alat penerangan jalan.

## B. Saran

Berkenaan dengan uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melalui pihak-pihak terkait harus benar-benar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi yang sudah ditentukan, sehingga dalam melakukan pengawasan terhadap alat penerangan jalan dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dapat memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan.
2. Kepada masyarakat atau pengguna jalan harus dapat memelihara dan menjaga alat penerangan jalan, jangan sampai dirusak atau diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab, sehingga dapat merugikan keuangan pemerintah kota, dan juga dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan, khususnya pengguna jalan.
3. Kepada Dinas Perhubungan melalui pihak yang ditunjuk harus dapat memperbaiki dan menghidupkan lampu jalan yang mati, serta melaksanakan undang-undang atau peraturan menteri yang mengatur tentang hal tersebut, agar dapat memberikan rasa nyaman kepada masyarakat pengguna jalan.



## DAFTAR PUSTAKA

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Abu Samah dkk, *Hukum Pemerintahan Daerah dan Desa di Indonesia*, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2016
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008
- Bachrul Elmi, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, UI-Press, Jakarta, 2002
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH UII, Yogyakarta, 2001
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Dadang Solihin dan Putut Marhayadi, *Panduan Lengkap Otonomi Daerah*, ISMEE, Jakarta, 2002
- Dharma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2011
- Haris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010
- HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- I.Nyoman Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Citra Utama, Jakarta, 2005
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990
- I.Widarta, *Cara Mudah Memahami Otonomi Daerah*, Lapera, Jakarta, 2001
- Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi, Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*, Insan Cendekia, Surabaya, 2001



Josef Riwo Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1988

Krishna D. Darumurti dan Umbu Rauta, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan pelaksanaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

M. Arif Nasution, *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Mandar Maju, Bandung, 2000

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1983

Muji Estiningsih, *Fungsi Pengawasan DPRD*, Univesitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005

Riant Nugroho D, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2000

R.Joeniarto, *Perkembangan Pemerintah Lokal*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000

Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989

T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 1999

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penrrangan

Jalan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA”, yang ditulis oleh:

Nama : **AUZANUL FIKRI**  
NIM : 11527101302  
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021  
**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua  
**Dr. H. Maghfirah, MA**

Sekretaris  
**Alpi Syahrin, SH. MH**

Penguji I  
**Dr. Abu Samah, SH. MH**

Penguji II  
**H. Mhd. Kastulani, SH. MH**



Mengetahui :  
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni  
Fakultas Syariah dan Hukum

**Jalilus, S.Ag**  
NIP. 19750801 200701 1 023





# JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

## Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

### SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : AUZANUL FIKRI

NIM : 11527101302

JURUSAN : ILMU HUKUM

JUDUL : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN  
TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018  
TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN  
PEKANBARU KOTA

Pembimbing: Firdaus, SH.MH

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 04 Agustus 2021

Pimpinan redaksi



Dr. M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.







Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3838/2021  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 28 Mei 2021

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

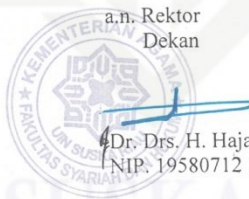
Nama : AUZANUL FIKRI  
NIM : 11527101302  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XII (Dua Belas)  
Lokasi : Dinas Perhubungan Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul  
:PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP  
ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI  
PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN  
DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai  
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan  
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag  
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





# PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

## SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-SKP/1432/2021



- a. Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.  
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.
- b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41408 tanggal 31 Mei 2021, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

### MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : AUZANUL FIKRI  
2. NIM : 11527101302  
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU  
4. Jurusan : ILMU HUKUM  
5. Jenjang : S1  
6. Alamat : DUSUN III BATU BELAH KEL. BATU BELAH KEC. KAMPAR-KAMPAR  
7. Judul Penelitian : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA
8. Lokasi Penelitian : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 31 Mei 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Pekanbaru

**ZULFAHMI ADRIAN, AP, M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750715 199311 1 001

### Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.  
2. Yang Bersangkutan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/41408  
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3838/2021 Tanggal 28 Mei 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

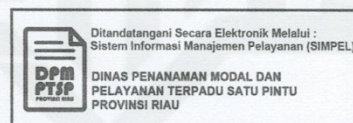
- |                      |  |
|----------------------|--|
| 1. Nama              | : AUZANUL FIKRI  |
| 2. NIM / KTP         | : 11527101302  |
| 3. Program Studi     | : ILMU HUKUM   |
| 4. Jenjang           | : S1   |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU  |
| 6. Judul Penelitian  | : PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA |
| 7. Lokasi Penelitian | : DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKANBARU   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 31 Mei 2021



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Tenayan Raya  
Gedung B.9 Lt. I dan II Kec. Tenayan Raya  
PEKANBARU



Pekanbaru, 12 Juli 2021

Kepada :

Yth. Ketua Jurusan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau

di -  
Pekanbaru

Nomor : 002 / KTSR - PS / VI / 2021  
Lampiran : -  
Hal : Surat keterangan telah selesai  
melaksanakan Riset/ Penelitian.

Sehubungan dengan Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  
Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/3838/2021  
tanggal 28 Mei 2021 perihal Riset Penelitian Penulisan Skripsi;

Nama : AUZANUL FIKRI  
NIM : 11527101302  
Jurusan : Ilmu Hukum S1  
Semester : XII (Dua Belas) / Genap  
Judul Penelitian : Pelaksanaan Pengawasan oleh Dinas Perhubungan terhadap  
Alat Penerangan Jalan berdasarkan Peraturan Menteri  
Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 tentang Alat Penerangan  
Jalan di Kecamatan Pekanbaru Kota.

Dengan ini dapat kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai  
melaksanakan Riset/ Penelitian Skripsi tersebut di Bidang KTSP Dinas Perhubungan  
Kota Pekanbaru.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA SEKSI PENERANGAN  
JALAN UMUM BIDANG KTSP  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA  
PEKANBARU

**M. ANSHAR, ST**

Penata

NIP. 19760116 199903 1 007



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/5541/2021  
Sifat : Penting  
Lamp. : -  
Hal : *Pembimbing Skripsi*

Pekanbaru, 15 Juli 2021

Kepada  
Yth. Firdaus, SH, MH  
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Pekanbaru


*Assalamu'alaikum warhamatullahi wabarakatuh*

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : AUZANUL FIKRI  
NIM : 11527101302  
Jurusan : Ilmu Hukum S1

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA"

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan  
Wakil Dekan I  
  
Erman. M. Ag

NIP. 19660803 199303 1 004

Tembusan:  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang UIN SUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PELAKSANAAN PENGAWASAN oleh DINAS PERHUBUNGAN TERHADAP ALAT PENERANGAN JALAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 27 TAHUN 2018, ditulis oleh saudara :  
TENTANG ALAT PENERANGAN JALAN DI KECAMATAN PEKANBARU KOTA.

Nama : AUZANUL FIRRI  
NIM : 11527101302  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Diseminarkan pada :  
Hari / Tanggal : KAMIS / 08 APRIL 2021  
Narasumber : MUHAMMAD ALPI SYAHRI, SH, MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa  
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,  
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

NIP. 19840430 200903 1000



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**AUZANUL FIKRI**, Penulis lahir di Dabo Singkep pada tanggal 17 November 1997 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Ishak. S.H (Alm) dan Ibu Zuliani, Pada tahun 2003, penulis mulai mengecap dunia Pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 015 Batu Belah. Lulus pada tahun 2009. Setelah itu, pada tahun 2009 penulis melanjutkan Pendidikan di MTs Pondok Pesantren Darul Qur'an, dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2012. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah (MA) Darul Qur'an dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2015, pada tahun yang sama berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan Pendidikan Strata-I (S-1) tepatnya di Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan menamatkan Pendidikan pada tahun 2021.

Berkat rahmat dan karunia Allah SWT serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul, "**Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Perhubungan Terhadap Alat Penerangan Jalan Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan Di Kecamatan Pekanbaru Kota**", dibawah bimbingan langsung Bapak Firdaus, S.H,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 28 Juli 2021, Penulis dinyatakan LULUS dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum(SH). semoga dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan serta menambah khazanah ilmu pengetahuan dan bermanfaat juga berguna bagi sesama.